

**STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
DALAMMENINGKATKAN INVESTASI  
DI KABUPATEN PEMALANG**

**Laporan Magang MB-KM  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen**

**Program Studi Manajemen**



**Disusun Oleh :**  
*Dwi Wahyuni Agustin*  
**Nim : 30401800094**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
SEMARANG  
2021**

## Laporan Magang MB-KM

# STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAMMENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN PEMALANG

Disusun Oleh :

*Dwi Wahyuni Agustin*

Nim : 30401800094

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Laporan Magang MB-KM  
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 Januari 2022

Dosen Pembimbing Lapangan,

Dosen Supervisor



Dra. Wasitowati, M.M  
NIK. 220405052



Widyo Utomo, S.kom  
NIP. 19801018 201101 1 001

## Laporan Magang MB-KM

# STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAMMENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN PEMALANG

Disusun Oleh :

*Dwi Wahyuni Agustin*

Nim : 30401800094

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 31 Januari 2022

### Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Dra. Wasitowati, M.M  
NIK. 220405052

Lapangan Dosen Supervisor

Widyo Utomo, S.kom  
NIP. 19801018 201101 1 001

Dosen Penguji I

Drs. H. Bedjo Santoso, MT, PhD  
NIK. 210403049

Dosen Penguji II

Zaenudin, M.M  
NIK. 210492031

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 31 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. H. Ardian Adhitama, SE, MM.  
NIK. 210499042

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Wahyuni Agustin

NIM : 30401800094

Judul Skripsi : “STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN  
PEMALANG”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Laporan Magang ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Magang ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Dwi Wahyuni Agustin

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Dwi Wahyuni Agustin

---

NIM : 30401800094

---

Program Studi : Manajemen

---

Fakultas : Ekonomi

---

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : "STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN PEMALANG"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2022  
Yang menyatakan,



Dwi Wahyuni Agustin

\*Coret yang tidak perlu

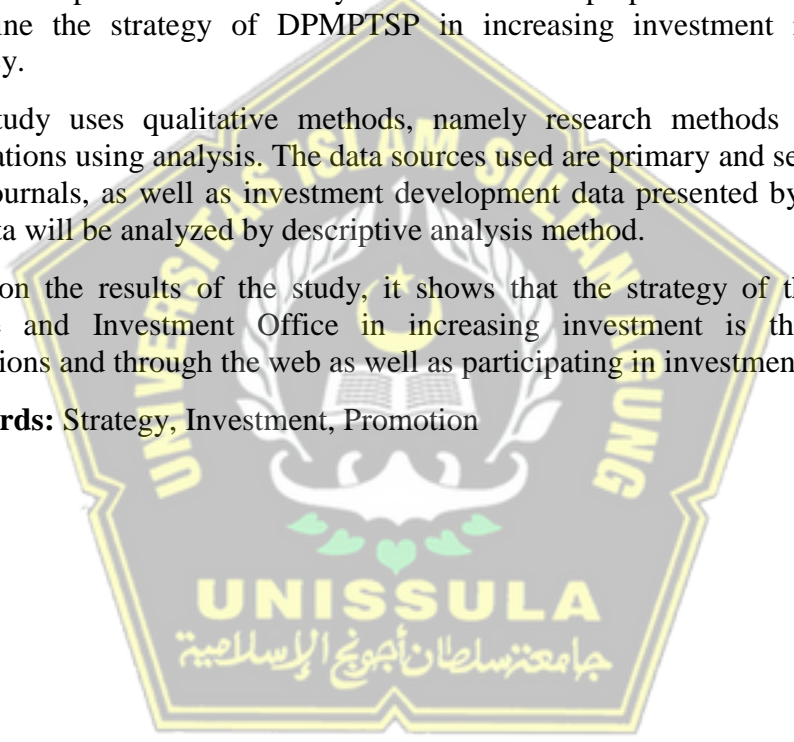
### ***ABSTRACT***

The current economic development is very fast with a continuous process that is one of the important factors for the survival and prosperity of a country. In an effort to carry out the objectives of national development, namely improving the welfare of the community, in which development cannot be separated from the role of investment. Investment is a benchmark for a country to be said to have a good or low level of economic growth. The strategy to increase regional investment is an interesting thing. The research entitled "The Strategy of the One Stop Service and Investment Service (DPMPTSP) in Increasing Investment in Pematang Rejang Regency", has a problem formulation of how the promotion strategy and workshops are carried out by DPMPTSP. The purpose of this study was to determine the strategy of DPMPTSP in increasing investment in Pematang Rejang Regency.

This study uses qualitative methods, namely research methods that provide explanations using analysis. The data sources used are primary and secondary data from journals, as well as investment development data presented by DPMPTSP. The data will be analyzed by descriptive analysis method.

Based on the results of the study, it shows that the strategy of the One Stop Service and Investment Office in increasing investment is through direct promotions and through the web as well as participating in investment workshops.

**Keywords:** Strategy, Investment, Promotion



## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi saat ini sangat cepat dengan prosesnya yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan suatu negara. Dalam upaya melaksanakan tujuan dari pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari adanya peran investasi. Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Strategi untuk meningkatkan investasi daerah menjadi hal yang menarik. Penelitian dengan judul “Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Pematang Siantar”, memiliki rumusan masalah bagaimana strategi promosi dan workshop yang dilakukan DPMPTSP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di kabupaten pematang siantar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis..Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari jurnal, serta data perkembangan investasi yang disajikan oleh DPMPTSP. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi yaitu dengan cara melalui promosi langsung dan melalui web serta mengikuti workshop investasi.

**Kata kunci:** Strategi, Investasi, Promosi



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan magang ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan laporan magang ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.si, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dra. Wasitowati, M.M selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan laporan magang.
3. Nurhidayati, SE, Msi, PhD selaku dosen wali yang sudah memberikan dukungan berupa pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Widyo Utomo, S.Kom selaku dosen supervisor yang telah membimbing dan membantu selama magang.



5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah memberikan izin penelitian dan juga membantu kelancaran penelitian dan kegiatan magang ini.
7. Kedua Orang tua yang selalu membantu baik secara moril dan materil.
8. Seluruh teman-teman dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga laporan magang ini memberikan manfaat dan mendorong penelitian-penelitian berikutnya.



Semarang, 25 Juli 2021

Penulis,

Dwi Wahyuni Agustin

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN LAPORAN MBKM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN LAPORAN MBKM .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Laporan .....	9
<b>BAB II. PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG ..</b>	<b>11</b>
2.1. Profil Organisasi.....	11
2.1.1. Visi dan Misi .....	11
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	13
2.1.3. Struktur Organisasi .....	15
2.1.4. Sumber Daya DPMPSTSP .....	32
2.2. Aktivitas Magang.....	33
<b>BAB III. IDENTIFIKASI MASALAH .....</b>	<b>36</b>
3.1. Identifikasi Masalah .....	36
3.2. Batasan Masalah.....	37
<b>BAB IV. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
4.1. Strategi .....	38
4.2. Investasi .....	40

<b>BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
5.1. Analisis .....	44
5.2. Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk Meningkatkan Investasi .....	47
5.3. Strategi Promosi .....	49
5.3.1. Pameran .....	49
5.3.2. Media Cetak.....	51
5.4. Strategi Teknologi Informasi.....	51
5.4.1. Online Single Submission .....	52
5.4.2. Gerai Investasi .....	53
 <b>BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	 <b>55</b>
6.1. Kesimpulan .....	55
6.2. Rekomendasi .....	55
 <b>BAB VII. REFLEKSI DIRI .....</b>	 <b>57</b>
7.1. Manfaat Dari Perkuliahan Untuk Magang .....	57
7.2. Manfaat dan Kekurangan Magang Untuk Pengembangan Soft-Skills.....	57
7.3. Manfaat dan Kekurangan Magang Terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif .....	58
7.4. Faktor-faktor Kunci Sukses .....	58
7.5. Rencana Pengembangan Diri .....	59
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
1.1. Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN/PMA.....	4
1.2. Kawasan Peruntukan Industri Eksisting Kab. Pematang ..... 5	5
2.1. Kedudukan Pegawai .....	32
2.2. Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	32
5.1. Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN/PMA .....	48



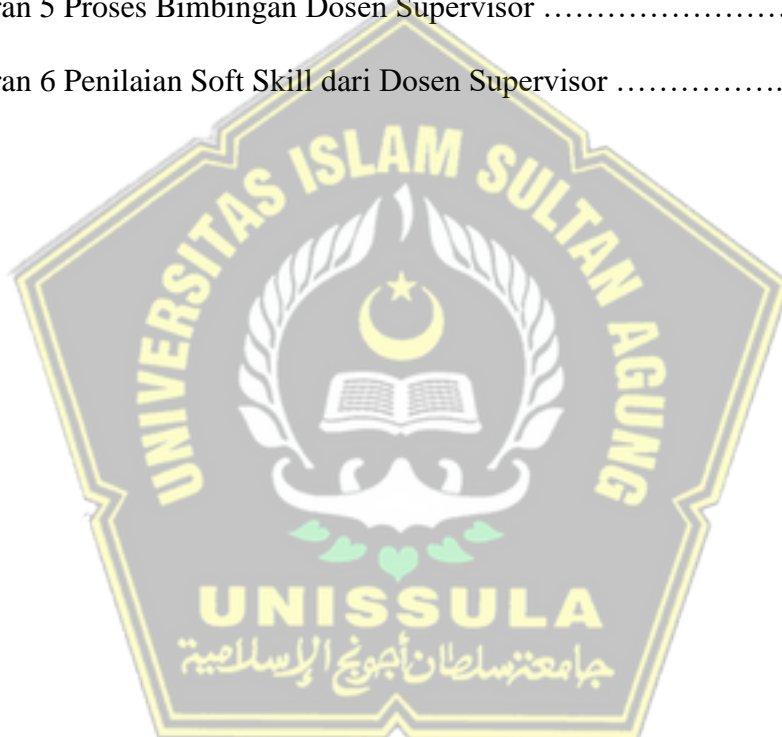
**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Pemalang .....	17
2.2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek .....	35
2.3. Kegiatan Monev ke salah satu perusahaan .....	35
5.1. Kegiatan Pameran DPMPTSP Pemalang .....	50
5.2. Kegiatan Pameran DPMPTSP Pemalang .....	50



**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Formulir Permohonan Magang .....	63
Lampiran 2 Daftar Hadir Peserta Magang MB-KM .....	64
Lampiran 3 Catatan Harian (Log-Book) Magang .....	71
Lampiran 4 Proses Bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan .....	75
Lampiran 5 Proses Bimbingan Dosen Supervisor .....	76
Lampiran 6 Penilaian Soft Skill dari Dosen Supervisor .....	77



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi menjadi terus menerus disertai dengan laju yang sangat cepat. Salah satu persyaratan terpenting bagi kelangsungan dan pembangunan berkelanjutan suatu bangsa adalah ini. Dalam perjalanan kemajuan ekonomi, masalah keuangan yang tidak memadai secara teratur muncul. Untuk mengejar pertumbuhan negara-negara industri, negara secara khusus harus mengumpulkan uang yang cukup besar untuk melaksanakan inisiatif pembangunan nasional, tetapi belum dapat melakukannya. Upaya ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana fungsi investasi tidak dapat dipisahkan dari peran pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal dapat mengakibatkan peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup, dan peningkatan pendapatan negara (Potoh & Budiarmo, 2020).

Perluasan berbagai investasi, terutama yang berasal dari sektor swasta yang produktif, yang berfungsi sebagai katalis pertumbuhan, membantu pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan didukung oleh investasi yang baik. Penyebabnya, investasi yang bisa meningkatkan kuantitas adalah investasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Investasi ini juga akan berdampak pada operasional perekonomian sehari-



hari. Terciptanya peluang investasi baru di daerah merupakan indikator sejauh mana perkembangan ekonomi di daerah tersebut.

Salah satu tanda apakah ekonomi suatu negara berkembang pada tingkat yang sehat adalah jumlah investasi di negara itu. Tingkat kesejahteraan negara ditentukan oleh kecepatan di mana investasi diproduksi karena investasi memotivasi negara untuk menghasilkan output dengan tujuan menyelesaikan urusan negara dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Jika kebijakan investasi diberlakukan, pengembangan koperasi dan UMKM dapat menguntungkan perekonomian Indonesia. Mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata, dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi nasional.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 membahas mengenai Penanaman Modal disebutkan :

“Bahwa dengan adanya perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional, maka sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan mendorongnya serta memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi serta tetap memperhatikan kepentingan ekonomi Nasional. Ini penting karena penting untuk membangun lingkungan yang mendorong investasi..”(jdih.kemenkeu.go.id)

Pemerintah pusat berupaya meningkatkan investasi, dan dinas investasi membantu mereka dalam hal ini. Sebagai penanggung jawab penanaman modal, kantor penanaman modal harus menjalankan tugasnya

dengan baik, termasuk memastikan penanaman modal tumbuh. Karena keberhasilan lembaga dalam tugasnya akan membantu mendorong peningkatan investasi, kinerjanya sangat berpengaruh pada keadaan pasar investasi. Penyebabnya adalah organisasi perlu berkinerja ekstra dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diperlukan bagi organisasi, dan untuk itu terjadi organisasi perlu didukung oleh tingkat infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. . Pada dasarnya, konsep kinerja merupakan pergeseran paradigma dari konsep produksi.

Di Indonesia, kota dan kabupaten telah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya bangsa dengan memanfaatkan kekuatan dan keunggulan masing-masing tingkat pemerintahan. Selanjutnya, daerah dan kota diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkat otonomi daerah. Investasi merupakan komponen yang paling signifikan dalam total perkembangan ekonomi suatu wilayah. Oleh sebab itu, setiap wilayah telah mengembangkan dan mengorganisir industri prospektif yang mungkin ada di sana untuk mempersiapkan calon investor yang dapat memutuskan untuk membelanjakan uangnya di lokasi tersebut.

Dalam dunia yang sempurna, investasi regional akan menjadi salah satu kekuatan utama di balik ekspansi regional. Sudah saatnya daerah-daerah saling bersaing untuk menarik investasi sebesar-besarnya sebagai katalis pertumbuhan daerah. Hal ini akan memungkinkan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi daerah, yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi lingkungan sekitar. Undang-undang mengontrol

insentif investasi dan langkah-langkah lain yang dimaksudkan untuk menyederhanakan hidup. Akibatnya, pemerintah daerah Indonesia memainkan peran penting dalam kemampuan bangsa untuk menarik investasi internasional.

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam beragam yang dapat dijadikan untuk ladang investasi bagi investor dalam dan luar negeri, Realisasi investasi sepanjang 2020 di Jawa Tengah tercatat Rp50,24 triliun dibandingkan target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang hanya Rp24,89 triliun saja (sumber: jatengprov.go.id) dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah di Jawa Tengah memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berinvestasi, salah satunya pada Kabupaten Pemalang dengan keanekaragaman potensi SDA tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengembangkan wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Pemalang berperan dalam menentukan industri yang unggul dan daya saing di Kabupaten Pemalang.

Apabila melihat data realisasi kumulatif nilai investasi PMDN dan PMA pada tahun 2018 sampai dengan 2020 di Kabupaten Pemalang terjadi kenaikan dan penurunan, adapun datanya sebagai berikut :

Table 1.1. Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun 2018-2020

No.	Jenis Perusahaan	2018 (Juta Rp)	2019 (Juta Rp)	2020 (Juta Rp)
1.	PMDN	103.357,80	51.606,50	110.094,80
2.	PMA	1.152,10	2.237,20	1.039,20

Jumlah	104.509,90	53.843,70	111,134
--------	------------	-----------	---------

Sumber : Bidang Bina Program dan Keuangan DPMPTSP Pemalang

Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa untuk PMDN dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan, kemudian pada tahun 2020 terjadi lagi kenaikan. Sementara untuk PMA dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 telah menetapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri. Kawasan tersebut meliputi luas lahan 1.909,04 hektar untuk mengakomodir kegiatan industri yang tersebar di beberapa kecamatan dengan lahan eksisting belum terbangun seluas 1.297,62 hektar. Besarnya lahan belum terbangun ini bisa menjadi daya tarik investasi bagi investor untuk dapat membangun industri skala menengah maupun besar di Kabupaten Pemalang.

Tabel 1.2. Kawasan Peruntukan Industri Eksisting Kab. Pemalang

No.	Kawasan Peruntukan Industri	Luas KPI (Ha)	Lahan Termohon (Ha)	Lahan Eksisting (Ha)
1	Kecamatan Pemalang	350,03	276,23	73,80
2	Kecamatan Taman	321,26	91,38	229,88
3	Kecamatan Petarukan	410,20	112,40	297,80
4	Kecamatan Ampelgading	237,09	115,95	121,14

5	Kecamatan Comal	2,82	0,09	2,73
6	Kecamatan Ulujami	167,05	0,16	166,89
7	Kecamatan Bantarbolang	25,74	15,00	10,74
8	Kecamatan Warungpring	5,72	0,21	5,51
9	Kecamatan Randudongkal	371,71	0,00	371,71
10	Kecamatan Belik	4,97	0,00	4,97
11	Kecamatan Moga	12,47	0,00	12,47
<b>Total</b>		<b>1.909,04</b>	<b>611,42</b>	<b>1.297,62</b>

Sumber : Buku Profil Investasi Kab. Pemalang Tahun 2020

Bangkitnya total perekonomian Kabupaten Pemalang secara intrinsik terkait dengan pertumbuhan industri-industri terkenal di bawah yurisdiksinya. Potensi sektoral perekonomian daerah mengacu pada situasi tertentu yang dipetakan berdasarkan sektor usaha, dengan keunggulan unik yang melekat pada masing-masing sektor usaha (Ali & Bakar, 2018). Isu utama pembangunan daerah adalah terlalu fokus perencanaan yang tidak mempertimbangkan keunikan daerah yang dikembangkan dan tidak memanfaatkan seluruh sumber daya manusianya secara maksimal. Di sisi lain, elemen penting lainnya juga diperlukan, termasuk kemajuan IPTEK dan akses SDM (Pesurnay & Parera, 2018).

Dengan potensi daerah yang memberikan peluang besar bagi setiap orang di Kabupaten Pemalang untuk mendapatkan keuntungan dari potensi ekonomi, juga akan dengan cepat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. [Referensi diperlukan] (PAD). Ada beberapa industri yang berkembang

pesat dan kompetitif yang terletak di Kabupaten Pemalang. Berikut adalah contoh industri dalam kategori ini: pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, pertambangan, perdagangan, dan industri. Pemerintah Kabupaten Pemalang akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan perbaikan semacam ini. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan pajak dari daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat penerimaan daerah menjadi lebih unggul dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat membutuhkan investor, baik lokal maupun asing. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membangun lingkungan yang kondusif untuk investasi, pemerintah kota harus berkontribusi pada perluasan kemungkinan investasi.

Investasi dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan, terutama yang berasal dari sektor swasta baik ekonomi nasional maupun internasional. Untuk mencapai tujuan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta visi dan misi lembaga itu sendiri, diperlukan rencana kerja yang strategis. Agensi selanjutnya akan dapat mencapai tujuannya. Strategi yang dilakukan berupa strategi teknologi yaitu dengan menyediakan pelayanan melalui online salah satunya dengan membuat web yang berisi tentang potensi investasi yang ada. Strategi promosi juga dilakukan oleh instansi untuk memasarkan jasanya kepada para investor, dengan tujuan agar para investor mengetahui potensi investasi di kab. Pemalang serta tertarik untuk melakukan penanaman modal. Dalam upaya menghadapi persaingan dengan daerah lain



strategi sangat penting dilakukan agar daerah tidak mengalami ketertinggalan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan investasi di Kab. Pemalang ?
- 2) Bagaimana strategi teknologi yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan investasi di Kab. Pemalang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis strategi promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan investasi di Kab. Pemalang.
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis strategi teknologi yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan investasi di Kab. Pemalang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen pemasaran, yang berupa strategi teknologi dan promosi untuk meningkatkan investasi.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan, khususnya dalam upaya



meningkatkan investasi melalui strategi pameran dan promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pematang.

### **1.5.Sistematika Laporan**

Dalam penulisan pra laporan magang ini terdapat sistematika laporan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan laporan magang yang tersusun menjadi 7bab, yaitu:

1) Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam laporan magang ini, tujuan penelitian dan sistematika laporan.

2) Bab II : Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Dalam bab kedua ini berisi tentang informasi mengenai profil organisasi baik dari struktur, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta aktivitas yang dilakukan selama magang.

3) Bab III : Identifikasi Masalah

Dalam bab ketiga ini berisi tentang masalah yang terdapat pada organisasi untuk kemudian akan dibahas dalam laporan ini.

4) Bab IV : Kajian Pustaka

Dalam bab keempat ini berisi tentang kajian pustaka yaitu menguraikan teori tentang implementasi strategi terhadap peningkatan investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pematang.

5) Bab V : Analisis dan Pembahasan

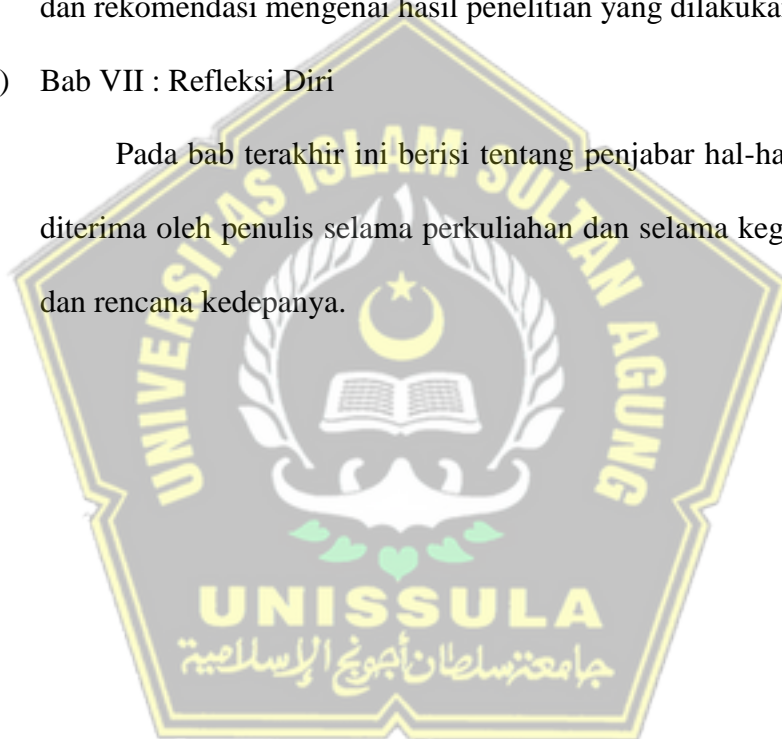
Dalam bab ke lima ini berisi tentang analisis masalah yang menjadi topik dalam penelitian dan pembahasan dari hasil analisis dan penelitian.

6) Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab ke tujuh ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

7) Bab VII : Refleksi Diri

Pada bab terakhir ini berisi tentang penjabar hal-hal positif yang diterima oleh penulis selama perkuliahan dan selama kegiatan magang, dan rencana kedepannya.



## BAB II

### PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

#### 2.1. Profil Organisasi

##### 2.1.1. Visi dan Misi

Dalam sebuah instansi tentunya pendiri akan menggagas tujuan yang ingin diraih untuk mencapai kesuksesan mendatang. Mewujudkan Tujuan tersebut diperlukannya gagasan tertulis di dalam sistem manajemen. Visi ini merupakan pedoman tertulis yang dapat dilihat oleh berbagai pihak mengenai tujuan berdirinya suatu instansi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kepercayaan pelanggan. Sedangkan untuk Misi merupakan cara yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dan dalam Misi yang dibuat juga terdapat alasan mengapa diperlukan berdirinya suatu instansi tersebut ada didalam masyarakat.

VISI DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG:

” Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang cepat, mudah, transparan dan Pasti ”

MISI DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG:

- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang baik
- Mewujudkan Supremasi Hukum di bidang Pelayanan Perizinan guna menjamin adanya kepastian hukum
- Mewujudkan pola informasi dan Sistem pelayanan perizinan yang transparan
- Meningkatkan Peluang usaha dalam rangka kesejahteraan masyarakat

- Mengupayakan Penyelesaian pengaduan Perizinan Dengan Semangat Musyawarah
- Mewujudkan Tertib Administrasi Ketatausahaan, keuangan dan Pengelolaan Rumah Tangga.

Dilihat dari Visi dan Misi yang dipaparkan oleh DPMPTSP tentunya dapat menjadi acuan untuk melaksanakan kinerja .dimana Visi yang dipaparkan terdapat tujuan Transparan dan Pasti. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP sebisa mungkin bersifat terbuka atas segala tugas dan kinerja yang dilakukan, seperti pelaporan kemajuan penanaman modal yang menjadi tanggungan dan wajib dilakukan dan dilaporkan sebagaimana mestinya. Dalam Visi juga menyebutkan suatu tujuan Pasti, dimana dalam melaksanakan kinerja pelayanan harus pasti sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak melakukan suatu kesalahan maupun kendali diluar prosedur yang sudah ditetapkan.

Misi dijelaskan juga bahwa DPMPTSP berkeinginan meningkatkan peluang usaha dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kinerja yang dilakukan oleh Bidang Penanaman Modal. Dimana dalam bagian penanaman modal melakukan upaya agar para investor tertarik untuk investasi di Kab. Pematang sehingga akan menciptakan lapangan kerja baru dan terciptanya kesejahteraan pada masyarakat.

### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan sebuah organisasi atau instansi diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang diberikan, maka sebuah instansi harus menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik. Tugas pokok dan fungsi atau biasa disebut Tupoksi ini merupakan gambaran tentang tugas dari masing – masing instansi tersebut yang mencakup sasaran utama pekerjaan yang dibebankan yang harus dilaksanakan. Tugas pokok dapat dikatakan sebagai hal yang harus dilaksanakan oleh jabatan yang diperoleh dalam suatu instansi, sedangkan fungsi merupakan perwujudan dari tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan instansi. Tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

#### 1) Tugas Pokok

- (1) Sub Urusan Pengembangan Penanaman Modal yaitu penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan pembuatan peta potensi investasi;
- (2) Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- (3) Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- (4) Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- (5) Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
- (6) selain mempunyai tugas tersebut diatas DPMPTSP Kab. Pemalang juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan.

Dalam pelaksanaan prosedur penanaman modal pada DPMPTSP. Data dan sistem informasi yang memadai harus selalu dimiliki oleh DPMPTSP dan sangatlah diperlukan baik untuk menjalankan pelayanan kepada investor maupun untuk mengetahui keadaan ataupun situasi yang terjadi pada DPMPTSP.

## 2) Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KabupatenPemalang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan salah satu fungsi yang ada di DPMPTSP. Hal ini diwujudkan atas pelaksanaan prosedur penanaman modal bagi investor yang akan berinvestasi, dimana prosedur penanaman modal yang dilakukan oleh Bidang Penanaman Modal Dinas DPMPTSP merupakan pelaksana evaluasi dan pelaporan yang wajib dilaksanakan oleh bagian Penanaman Modal.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Dalam sebuah instansi semua hal tidak dapat dikerjakan oleh satuorang saja. Untuk dapat menjalankan sebuah tujuan yang dimiliki sebuah instansi tentunya kita perlu membutuhkan pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Pembagian kerja ini disebut sebagai struktur organisasi. Karena struktur organisasi adalah susunan atau hubungan dalam sebuah pembagian kerja dan memberikan kejelasan tentang posisi dan tanggungjawab setiap jabatan.

Struktur organisasi pada DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang No. 84 Tahun 2016 mengenai Uraian Tugas Jabatan Struktural DPMPTSP Kabupaten Pemalang terdiri dari :

- 1) Kepala dinas
- 2) Sekertariat , terdiri dari :

(1) Sub bagian Bina Program dan Keuangan



- (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
  - (1) Seksi Pengembangan Penanaman Modal
  - (2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- 4) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
  - (1) Seksi Pelayanan
  - (2) Seksi Perizinan
- 5) UPTD
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.





Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Pemalang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun Uraian Tugas Dari Jabatan Struktural di DPMPTSP yang terkait dengan Penanaman Modal, sebagai berikut:

## Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal bertugas sebagai berikut:

- 1) Menyelaraskan program dan kegiatan Bidang Penanaman Modal dengan dokumen perencanaan sebagai sumber informasi bagi penyusunan rencana kerja dan kertas anggaran;
- 2) Membuat cetak biru kebijakan Pengembangan Investasi dengan mempertimbangkan inisiatif dan tindakan saat ini; ini akan beroperasi sebagai manual untuk melaksanakan tugas.
- 3) Membuat gambaran umum tentang kebijakan Pengendalian Investasi, dengan mempertimbangkan berbagai inisiatif dan program, untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kewajiban;
- 4) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Penanaman Modal sesuai dengan pedoman pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaannya tepat sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan;
- 5) Peningkatan kuantitas penanaman modal yang dicapai di daerah, diselenggarakan kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada peraturan tentang pedoman dan tata cara pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
- 6) Membuat konsep inovasi di bidang penanaman modal berdasarkan identifikasi dan analisis masalah untuk peningkatan kerja serta kualitas pelayanan publik;

- 7) Mengkoordinasikan berbagai tugas yang diberikan kepada sektor di dalam sektor penanaman modal untuk memastikan tugas-tugas tersebut diselesaikan secara terpadu;
- 8) Menilai bagaimana pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal sesuai pada rencana kegiatan sesuai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja;
- 9) Dalam rangka tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas, memberikan laporan keberhasilan pelaksanaan kewajiban yang diberikan kepada Bidang Penanaman Modal; dan
- 10) Melaksanakan setiap kewajiban ekstra dinas yang telah diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tupoksi dalam menunjang kinerja organisasi.

1) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal

Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan program dan kegiatan Bagian Pengembangan Penanaman Modal sesuai dengan dokumen perencanaan sehingga dapat digunakan sebagai sumber bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- (2) Membuat dokumen yang diperlukan untuk kebijakan pengembangan investasi sesuai dengan rencana dan kegiatan yang akan menjadi pedoman penyelesaian pekerjaan;

- (3) Membuat dokumen rencana penciptaan iklim penanaman modal sesuai dengan tata cara dan persyaratan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan penanaman modal pemerintah daerah;
- (4) wajib membuat rancangan bahan penetapan pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan tata cara dan ketentuan PERPU yang berlaku dalam rangka mendorong perbaikan iklim penanaman modal secara umum.
- (5) Mengumpulkan data dan informasi peta potensi investasi disesuaikan pada prosedur dan spesifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman penilaian potensi penanaman modal;
- (6) Menyusun rencana tujuan penanaman modal daerah sesuai dengan peta potensi dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian daerah;
- (7) Berdasarkan arahan Pemerintah Daerah, melakukan kegiatan promosi investasi sesuai dengan tata cara dan pedoman Perpu dalam upaya menarik investasi tambahan;
- (8) Untuk memberikan pelayanan prima, melakukan sosialisasi tentang protokol dan praktik pelayanan penanaman modal sesuai dengan protokol dan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- (9) Mempermudah perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi bisnis, lembaga internasional, dan pihak lain yang terlibat dalam pengembangan penanaman modal untuk bekerjasama sesuai dengan tata cara dan pedoman peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka peningkatan penanaman modal;

- (10) Membuat materi baru untuk Bagian Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan analisis masalah dan efektivitas tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan standar pelayanan publik;
- (11) Mengevaluasi sejauh mana tugas Bagian Pengembangan Penanaman Modal telah dilaksanakan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun dalam rangka peningkatan kinerja;
- (12) Penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Bagian Pengembangan Penanaman Modal secara efektif dengan memperhatikan konteks pertanggungjawaban penyelesaian tugas; dan
- (13) Melaksanakan kewajiban kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna menunjang kinerja organisasi secara keseluruhan.

## 2) Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan dokumen perencanaan yang akan menjadi dasar pembuatan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- 2) Menyusun sumber daya yang diperlukan untuk pembuatan kebijakan Pengendalian Investasi, dengan memperhatikan

rencana dan tindakan yang akan menjadi panduan untuk penyelesaian pekerjaan;

- 3) Memfasilitasi akses ke pengetahuan tentang praktik dan pedoman yang memandu pelaksanaan dan pengelolaan investasi sesuai dengan undang-undang dan aturan yang mengatur proses tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat;
- 4) melakukan inventarisasi hambatan dan solusi penanaman modal di bawah pengawasan Pemerintah Daerah sesuai dengan tata cara dan spesifikasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengembangan penanaman modal;
- 5) Mewujudkan pelayanan prima, mempermudah penyelesaian pengaduan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) dalam rangka pengawasan pelaksanaan usaha, pengawasan penggunaan fasilitas dan insentif yang ditawarkan, serta pelaksanaan pemeriksaan lapangan di lokasi proyek, sesuai dengan tata cara dan pedoman peraturan perundang-undangan;
- 7) Menindaklanjuti penyimpangan dari persyaratan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan hukum;



- 8) Mengelola Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Penanaman Modal secara Elektronik (SPIPISE) dari Aplikasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka integrasi data dan efisiensi administrasi;
- 9) Untuk mempermudah mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan investasi, bekerja sama dengan otoritas teknis daerah yang tepat sesuai dengan prosedur dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, menyusun materi baru Bagian Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan identifikasi dan analisis masalah;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan rencana kegiatan dan program yang telah disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
- 12) menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bagian Pengendalian Penanaman Modal secara efisien dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

13) Melaksanakan kewajiban kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna menunjang kinerja organisasi secara keseluruhan.

Bidang investasi memiliki tugas, yaitu membuat kegiatan promosi, melaksanakan sosialisasi mengenai protokol dan tata cara pelayanan investasi, serta mengumpulkan data dan informasi mengenai potensi investasi yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, PERPU yang berlaku, Bidang Penanaman Modal bertugas membuat rencana investasi yang akan dilakukan pada periode mendatang serta memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi, asosiasi bisnis, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam pengembangan investasi.

Adapun Uraian Tugas Jabatan Struktural DPMPTSP Kabupaten Pemalang Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang No 84 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas PMPTSP

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai Dokumen Acuan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Strategis ( Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bidang Pemerintahan, Penanaman Modal,

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satu Kerja Sama Pemerintahan, Investasi, dan Satu Kerja

- (2) Menghasilkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen yang menguraikan bagaimana anggaran akan dilaksanakan (DPA) dengan menggunakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Satu Pintu Pelayanan Terpadu sebagai acuan. Memastikan bahwa pejabat yang berwenang telah menyetujui usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Periksa untuk melihat apakah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diusulkan telah sesuai
- (3) Membuat kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan program kegiatan di bidang tersebut sebagai arahan pekerjaan yang akan dilakukan,
- (4) Bertanggung jawab untuk mengawasi proyek dan kegiatan DPMPTSP sesuai dengan pedoman pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaannya tepat pada jalur dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan
- (5) Menggunakan analisis dan/atau teknologi untuk mengembangkan inovasi daerah untuk urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi yang dapat dilakukan;

2) Sekretaris

Sekretaris Dinas PMPTSP mempunyai Urusan tugas sebagai berikut :

- (1) Memanfaatkan dokumen perencanaan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan kesekretariatan sebagai sumber informasi bagi pembuatan rencana kerja dan kertas anggaran,
- (2) Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- (3) Membuat rancangan kerja kebijakan kesekretariatan yang sesuai dengan program dan kegiatan sebagai arahan pelaksanaan tugas;
- (4) Menyelaraskan operasional Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbidang Program dan Keuangan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
- (5) Untuk memutakhirkan informasi publik, penting untuk:  
Mengkoordinasikan penyebaran dan distribusi informasi publik dengan cara yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik;

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menyelenggarakan kegiatan dan program Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dokumen rencana kerja dan anggaran;
- (2) Rancangan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengacu pada Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai kerangka pelaksanaan inisiatif;
- (3) menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan standar daerah untuk efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- (4) Menggunakan sistem informasi pembangunan daerah untuk mengelola dan mengevaluasi pembangunan daerah dengan mengelola data tindakan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (5) Ikuti petunjuk dalam surat pertanggungjawaban keuangan saat melakukan tugas seperti distribusi anggaran dan verifikasi untuk melakukan kontrol atas pengelolaan keuangan.;

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Menyusun rencana dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan sumber penyusunan rencana kerja dan kertas anggaran;
- (2) Mengelola semua aspek administrasi umum, termasuk korespondensi, dokumen, dan catatan, untuk memudahkan tugas diselesaikan secara efektif;
- (3) Mengelola administrasi rumah meliputi pengadaan dan pemeliharaan efektif ruang kantor, peralatan, tempat untuk mengadakan pertemuan resmi, dan barang milik daerah dengan tujuan untuk memastikan kelancaran tugas.
- (4) Memelihara pengelolaan administrasi kehutanan yang tepat, termasuk kebijakan dan komunikasi publik, untuk memungkinkan pelaksanaan tugas secara efisien.
- (5) Peran manajemen dalam mengelola manajemen meliputi penetapan sistem dan prosedur kerja sesuai dengan tujuan kerja untuk memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- (1) Membuat rencana kerja dan anggaran di bidang pelayanan perizinan dengan menggunakan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan dokumen perencanaan;
- (2) penyusunan kebijakan pengendalian perizinan pelayanan sesuai dengan rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (3) merencanakan rencana dan operasional Bidang Jasa Perizinan sesuai pada pedoman pelaksanaan supaya pelaksanaannya tepat pada maksud dan tujuan yang telah ditetapkan;
- (4) Mengkoordinir Kegiatan Pelayanan Perizinan yang berada dalam wilayah hukum daerah dan mengacu pada persyaratan hukum bagi terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mengefektifkan, meningkatkan, dan mempercepat proses perizinan bagi masyarakat;
- (5) Membuat konsep inovasi pelayanan perizinan berdasarkan analisis dan identifikasi masalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan standar pelayanan publik;

a. Kepala Seksi Pelayanan

- (1) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai bahan sumber dokumen rencana kerja dan anggaran;
- (2) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat kebijakan pelayanan yang sejalan dengan program



dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas.

- (3) Menyusun strategi pembangunan dan rencana pelayanan perijinan yang tidak terstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai roadmap penciptaan pelayanan perijinan pemerintah daerah;
- (4) Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terpadu satu pintu dan tidak terstruktur di bidang Penanaman Modal yang berada di bawah kendali Pemerintah Daerah, sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan,
- (5) Pastikan bahwa tugas bagian Layanan dikoordinasikan saat dilakukan untuk menjamin bahwa operasi diselesaikan dengan lancar,
- (6) bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan tentang pelaksanaan yang efisien dari tanggung jawab Bagian Layanan P dalam kerangka akuntabilitas Anda untuk penyelesaian tugas,

b. Kepala Seksi Perizinan

- (1) Menyusun rencana program dan kegiatan Bagian Perizinan sesuai dengan dokumen perencanaan yang akan digunakan

sebagai bahan sumber pembuatan dokumen rencana kerja dan anggaran;

- (2) Menyusun data rancangan kebijakan yang akan digunakan seksi perijinan sesuai dengan tujuan dan inisiatif yang akan menjadi peta jalan pelaksanaan tugas.
- (3) Merumuskan konsep strategi pengelolaan perizinan yang tidak terstruktur sesuai dengan prosedur dan spesifikasi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengembangan Pelayanan Perizinan Pemerintah Daerah;
- (4) Melakukan kegiatan pelayanan perijinan dan nonperizinan secara tidak terstruktur dalam satu lokasi terpadu di bidang Penanaman Modal yang berada di bawah kendali Pemerintah Daerah, sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang sah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan;
- (5) Melaksanakan tata cara perizinan dan sosialisasi tata cara perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hal ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan usaha di daerah dan informasi tentang kemudahan pelayanan perizinan.

#### 2.1.4. Sumber Daya DPMPTSP

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalangerterdapat Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 60 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang PNS dan 34 orang THL dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kedudukan Pegawai

No	Kedudukan Pegawai	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	2
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Kepala Seksi	2
6	Staf	18
7	THL	34
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>

Sumber: Sub Umum dan Kepegawaian

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah:

Table 2.2. Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	28 Orang
4	D3	1 Orang
5	S1	23 Orang
6	S2	8 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>60 Orang</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## 2.2. Aktivitas Magang

Kegiatan magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang akrab disebut dengan MB-KM ini dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Pematang Jaya, Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juli. Selama kegiatan magang berlangsung penulis ditempatkan pada bidang Penanaman Modal, kegiatan dibidang tersebut berkaitan dengan segala keperluan penanaman modal yang ada di Kab. Pematang Jaya seperti mendata investasi baik perusahaan dalam negeri (PMDN) ataupun perusahaan asing (PMA), melakukan monitoring dan evaluasi, dan merencanakan target investasi dan strategi pengembangan iklim penanaman modal.

Yang dikerjakan Penulis selama kegiatan magang adalah membantu memeriksa laporan LKPM atau Laporan Kemajuan Penanaman Modal perusahaan melalui website resmi [lkpmonline.bkpm.go.id](http://lkpmonline.bkpm.go.id) untuk memantau realisasi investasi dan produksi, LKPM wajib disusun secara berkala oleh perusahaan dan dilaporkan ke DPMPTSP setiap triwulan. Badan usaha harus mengajukan LKPM sesuai dengan Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020, dan jika tidak, BKPM dapat mengambil tindakan, termasuk membekukan atau mencabut izin usaha perusahaan. Saat menyampaikan informasi kepada BKPM dan badan pemerintah yang membidangi penanaman modal, LKPM memberikan rincian perkembangan permodalan serta kesulitan yang mungkin dihadapi perusahaan.

Selain membantu memeriksa LKPM Penulis juga membantu membuat jadwal Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan atau yang sering disebut monev ke perusahaan, perusahaan yang dibuatkan jadwal untuk dilakukan monev dipilih berdasarkan pemeriksaan data LKPM dengan melihat data PMA PMDN yang ada, perusahaan yang akan dimonev biasanya memiliki kriteria yaitu perusahaan yang belum pernah melaporkan LKPM sama sekali, perusahaan yang sudah pernah melaporkan LKPM namun tidak tertib melaporkan setiap triwulan, dan perusahaan yang sudah melaporkan LKPM namun masih perlu diperbaiki lagi. Setelah membuat jadwal Penulis juga ikut serta dalam kegiatan monev yaitu mendatangi langsung ke beberapa perusahaan yang berada di Kab. Pematang untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dan untuk mengetahui kemajuan realisasi investasi secara langsung.

Kegiatan lain yang dilakukan Penulis yaitu ikut membantu persiapan untuk kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, mulai dari membuat surat untuk perusahaan atau pelaku usaha yang akan diundang dan menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa saat kegiatan tersebut. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk mengumpulkan perusahaan untuk kemudian diberi materi sesuai tema yang ingin dicapai, dimana materi tersebut akan disampaikan oleh narasumber yang sudah terpercaya. Dalam kegiatan tersebut juga diharapkan agar jika ada perusahaan yang mengalami kendala atau kurang paham tentang materi atau hal lain terkait penanaman modal bisa langsung disampaikan untuk kemudian dibantu didiskusikan

bersama. Selama magang Penulis juga membantu mencatat surat masuk dan surat keluar yang ada di bidang investasi, serta membantu di bagian lain yang membutuhkan bantuan seperti bidang Pelayanan dan Perizinan.



Gambar 2.2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek



Gambar 2.3. Kegiatan Monev ke salah satu perusahaan





## **BAB III**

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

#### **3.1. Identifikasi Masalah**

Dalam suatu organisasi tentu tak terlepas dari adanya masalah baik masalah internal maupun eksternal. Dalam suatu instansi pemerintah seperti DPMPTSP juga terdapat berbagai masalah baik dari aspek sumber daya manusia, pelayanan dan aspek lainnya. Namun pada penelitian kali ini akan berfokus pada masalah yang terdapat di Bidang Penanaman Modal yaitu bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan investasi di daerah Kab. Pematang Jaya.

Permasalahan pada DPMPTSP faktor penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung. Munculnya Covid-19 telah banyak membawa berbagai tantangan kepada dunia termasuk Indonesia. Tantangan tersebut mempengaruhi banyak sektor, seperti sektor pendidikan, sektor sosial, sektor kesehatan, dan terutama pada sector ekonomi yang memiliki peran penting bagi Negara. Kinerja ekonomi pada saat pandemi ini sedang mengalami penurunan yang cukup drastis, pembatasan sosial dengan skala yang besar demi mengurangi penyebaran Covid-19 ini juga sangat mempengaruhi pada aktivitas perekonomian Indonesia.

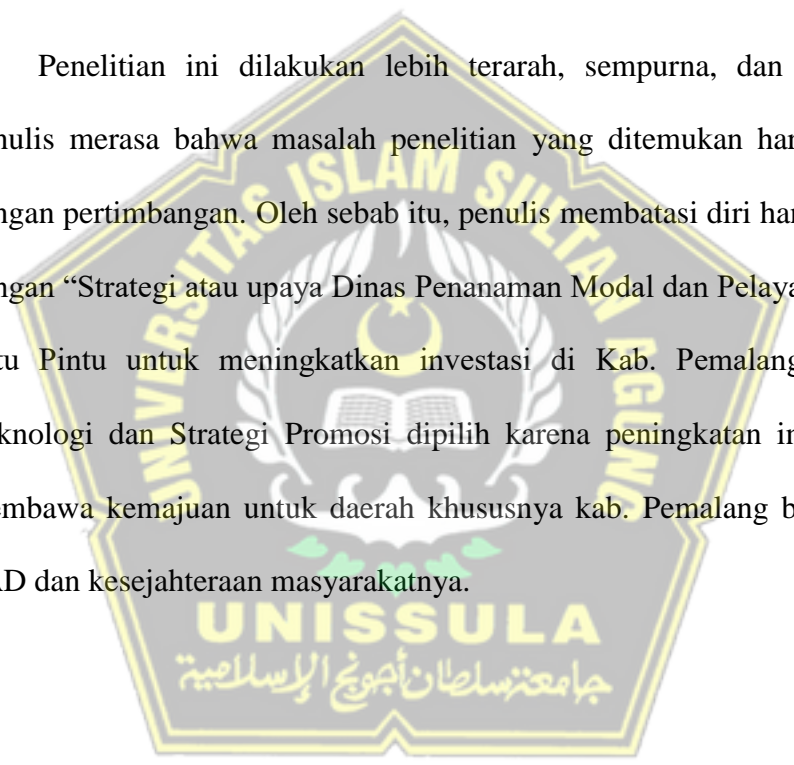
Dengan demikian DPMPTSP khususnya bidang investasi perlu melakukan inovasi strategi untuk menarik para investor agar tertarik melakukan penanaman modal di daerah Kab. Pematang Jaya sehingga iklim ekonomi di Kab. Pematang Jaya tidak terjadi penurunan secara drastis dan



kesejahteraan masyarakatnya tidak mengalami penurunan yang berarti. Namun Strategi yang dilakukan juga harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini yaitu dengan memperhatikan peraturan dari pemerintah pusat tentang upaya untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia.

### **3.2. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan lebih terarah, sempurna, dan menyeluruh, penulis merasa bahwa masalah penelitian yang ditemukan harus dikurangi dengan pertimbangan. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Strategi atau upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan investasi di Kab. Pematang Jaya”. Strategi Teknologi dan Strategi Promosi dipilih karena peningkatan investasi akan membawa kemajuan untuk daerah khususnya kab. Pematang Jaya baik dari segi PAD dan kesejahteraan masyarakatnya.



## BAB IV

### KAJIAN PUSTAKA

#### 4.1. Strategi

Pembangunan visi dan tujuan organisasi, menentukan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut guna memberikan nilai pelanggan setinggi mungkin, Herfita et al. (2017) mengklaim bahwa strategi adalah proses yang memerlukan tindakan perencanaan untuk masa depan. Hal ini membuat pembuatan rencana strategis untuk TI dan SI diperlukan untuk implementasi teknologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI). Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa ketika sistem ini diterapkan di masa depan, mereka akan tepat dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Proses pembuatan portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mempraktikkan strategi mereka dan mencapai tujuan bisnis mereka adalah komponen dari perencanaan strategis SI/TI, menurut Karsana et al. (2019). "Perencanaan strategis SI/TI" adalah studi tentang bagaimana sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) mempengaruhi kinerja bisnis dan bagaimana SI/TI membantu perusahaan memutuskan aktivitas strategis. Strategi promosi digambarkan sebagai tindakan yang direncanakan dengan maksud membujuk dan menginspirasi pelanggan untuk membeli barang atau jasa perusahaan guna mencapai tujuan peningkatan penjualan, menurut Yunita et al. (2018).

Erislan (2018) menguraikan strategi, yaitu pengertian secara umum dan khusus.

- a. Pengertian umum, strategi merupakan perumusan rencana jangka panjang yang terfokus pada tujuan perusahaan yang dilakukan oleh para pemimpin, yang diikuti dengan perencanaan metode atau kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Pengertian khusus, strategi ialah tindakan yang memiliki sifatberkelanjutan dan *incremental* (senantiasa meningkat) serta dilakukan dengan mengedepankan harapan atau keinginan pelanggan dimasa yang akan datang.

Menurut Freddy Rangkuti (2017, hal 6-7) pada dasarnya strategi dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe strategi:

- a. Strategi manajemen, meliputi strategi yang dapat diterapkan oleh manajemen dengan mengubah metode yang digunakan untuk merumuskan rencana menyeluruh. Hanya beberapa contoh strategi yang terkait dengan pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, perluasan pasar, manajemen keuangan, dll.
- b. Strategi investasi, ialah aktivitas yang berfokus pada investasi. Perusahaan harus menentukan, di antara alternatif potensial lainnya, apakah ingin mengikuti strategi defensif, rencana pengembangan agresif, strategi untuk membangun divisi baru, atau strategi pembuangan.
- c. Strategi bisnis, Karena difokuskan pada fungsi manajerial, rencana bisnis semacam ini juga dikenal sebagai strategi bisnis fungsional. Misalnya,

ada strategi pemasaran, strategi manufaktur atau operasi, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi keuangan.

Dari uraian di atas didapatkan kesimpulan bahwa strategi adalah rencana kebijakan atau tindakan yang diambil oleh suatu organisasi atau korporasi yang akan menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan keselarasan dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat tercapai. berkelanjutan. Kita dapat menarik kesimpulan ini karena istilah yang muncul sebelumnya diambil langsung dari kamus.

#### **4.2. Investasi**

Kata "investasi" dan "penanaman modal" sering digunakan dalam dokumen hukum dan praktik perusahaan. Meskipun "investasi" lebih sering digunakan dalam bahasa undang-undang untuk merujuk pada transaksi keuangan, ini lebih sering digunakan di sektor bisnis.

Sari (2020) Investasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum (badan hukum) dalam upaya untuk mencapai salah satu tujuan berikut: meningkatkan atau mempertahankan nilai modal seseorang, baik dalam bentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak kekayaan intelektual, atau keahlian. Fahmi Rasjid dkk. (2021) mendefinisikan investasi sebagai uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai pembelian barang-barang yang dipergunakan dalam produksi guna memperluas kapasitas perekonomian dalam penghasilan barang dan jasa, baik investasi tersebut lokal maupun internasional. Apakah investasi

dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri, definisi ini benar. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan volume produksi, yang akan memperluas kesempatan kerja produktif, yang akan meningkatkan pendapatan per kapita dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Regiyati dan Rusli (2021) mengatakan bahwa investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan pada waktu sekarang agar memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Kemudian seseorang yang menanamkan modal disebut dengan investor maupun penanam modal, penanam modal dibagi menjadi 2 yaitu Penanam Modal Dalam Negeri(PMDN) ataupun Penanam Modal Asing(PMA). PMDN ialah penanam modal dan melaksanakan usaha di dalam negeri, sedangkan PMA merupakan investasi asing yang melaksanakan usahanya di Indonesia.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu aktivitas perorangan ataupun perusahaan yang dilakukan disuatu daerah baik berupa uang tunai maupun asset peralatan produksi dan hal lain yang menunjang dalam kegiatan usaha atau produksi yang dilakukan pada masa sekarang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Penanaman Modal dengan memperhatikan berbagai sumber uang Penanaman modal didefinisikan sebagai setiap dan semua aktivitas investasi, termasuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), dengan tujuan melakukan usaha di dalam

wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman modal dalam negeri didefinisikan sebagai “kegiatan menanam uang untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri” berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri yang menggunakan modal dalam negeri termasuk dalam definisi ini.

“Penanaman Modal Dalam Negeri” (PMDN) adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu investasi yang dananya berasal dari Indonesia dan investornya adalah warga negara Indonesia. Jika salah satu pihak memenuhi salah satu persyaratan berikut, mereka dapat menjadi penanam modal dalam negeri: (1) harus warga negara Republik Indonesia; (2) mereka harus perusahaan komersial Indonesia; atau (3) harus berbadan hukum Indonesia.

- b. Bisnis Internasional (PMA) Penanaman modal asing terbatas pada yang dilakukan di perusahaan asing langsung yang secara aktif terlibat dalam bagaimana perusahaan dijalankan di Indonesia.

Penanaman modal asing didefinisikan sebagai “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing seluruhnya maupun yang mengandalkan penanaman modal” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Konsep ini mencakup investor internasional yang bergantung sepenuhnya pada uang asing atau investasi lokal.





## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Analisis**

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa Kepala Bidang DPMPTSP Kabupaten Pemalang yaitu Bapak Prasetyo, S.H., M.Si. selaku Kabid Penanaman Modal, dan Ibu Esthie Wijayanti, S.P., M.M. selaku Kasi Pengembangan Penanaman Modal. Pemaparan pertama tentang perkembangan penanaman modal yang ada di Kabupaten Pemalang menurut Bapak Prasetyo, S.H., M.Si perkembangan penanaman modal di Pemalang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:

“Jadi untuk perkembangan penanaman modal di Kabupaten Pemalang tahun 2018 itu mencapai Rp.104.509.900.000,- sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.53.843.700.000,- kemudian di tahun 2020 meningkat lagi sehingga mencapai Rp.111.134.000.000,- ”

Pertumbuhan yang dialami Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi pemerintah daerah karena daerah tersebut masih dalam proses pengembangan berbagai industri investasi. Mengingat Kabupaten Pemalang merupakan salah satu penghasil nanas madu terkemuka di seluruh Indonesia, rasanya nanas madu menjadi lambang provinsi tersebut. Saat diwawancarai, beliau mengatakan: “Sebenarnya banyak sekali objek wisata di Kabupaten Pemalang, namun

nanas madu paling berpotensi menjadi ikon Kabupaten Pemalang karena seperti diketahui beberapa tahun lalu, patung nanas madu didirikan di tengah alun-alun kota Pemalang."

Menelisik lebih jauh mengenai potensi yang ada di Kabupaten Pemalang Ibu Esthie Wijayanti, S.P., M.M. menanggapi:

"Untuk potensi yang ada sekarang lebih banyak lagi utamanya adalah wisata. Mulai dari wilayah Pemalang utara yang terdapat banyak pantai yang menjadi tempat wisata dan wilayah Pemalang selatan yang banyak perbukitan juga sekarang banyak dibuka area wisata alam."

Agar suatu daerah memiliki peningkatan kuantitas investasi daerah yang dicapai, daerah tersebut harus memiliki peningkatan potensi yang dapat ditawarkan kepada investor. Salah satu potensi Kabupaten Pemalang adalah industri pariwisata yang memiliki ketertarikan investasi baik dari dalam maupun luar Indonesia. Padahal, Kabupaten Pemalang memiliki potensi wisata yang cukup besar. Pantai dan perbukitan di daerah tersebut, misalnya, dapat diubah menjadi properti investasi yang berharga dan menarik wisatawan dari berbagai kelompok sosial.

Dua dari berbagai sektor terkait penanaman modal yang menjadi komponen DPMPSTSP Kabupaten Pemalang adalah bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Pengendalian Penanaman Modal. Masing-masing profesi terkait investasi ini memiliki peran yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain. Salah satu tugasnya di bidang pembangunan ekonomi

adalah mendorong pertumbuhan investasi, penjelasan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pengembangan Penanaman Modal Ibu Esthie Wijayanti, S.P., M.M.:

“Kami menjalankan kampanye untuk mempublikasikan apa yang ada di Kabupaten Pemalang, seperti mengikuti acara pameran, mempublikasikan di situs Outlet Investasi, memposting berita dari DPMPTSP di Media Sosial (Medsos), dan membuat buku peluang investasi yang dimaksudkan untuk menarik investor. Aksi ini dilakukan untuk memperkenalkan konten Kabupaten Pemalang..”

Kemudian dalam hal perijinan dan penanaman modal Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Prasetyo, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Penanaman Modal:

“DPMPTSP Kabupaten Pemalang menganut aturan yang sama untuk investasi dan perizinan seperti DPMPTSP daerah lainnya, yaitu PP No. 24 Tahun 2018. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah telah memberikan kemudahan bagi calon pemilik perusahaan dan investor untuk menggunakan DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Sistem Online Single Submission (OSS) untuk mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP.”

Pemerintah pusat baru-baru ini menerbitkan undang-undang baru untuk merampingkan layanan publik yang terkait dengan perizinan dan investasi, seperti yang terlihat dari penjelasan sebelumnya. Untuk

mempercepat proses mendapatkan izin publik, maka dibuatlah aturan yang dikenal dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Aturan ini akan berdampak pada penerapan Online Single Submission System yang akan mengefektifkan pelayanan publik. "Online Single Submission" (OSS), singkatan dari izin usaha yang terintegrasi secara digital, adalah singkatan dari singkatan tersebut..

## **5.2. Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk Meningkatkan Investasi**

Pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola berbagai sektor di daerahnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah dibantu oleh berbagai instansi yang ditugaskan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Tugas membantu pemerintah di bidang penanaman modal telah dilimpahkan kepada suatu instansi daerah yang disebut DPMPTSP. Tujuan investasi adalah agar segala jenis kegiatan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Pemalang, menurut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2016 yang meliputi status, struktur

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pemalang.

Kabupaten Belik yang memiliki ladang nanas madu yang cukup banyak ini terletak di bagian selatan Pemalang dan konon merupakan tempat pertama kali munculnya nanas madu. Daerah yang terkenal dengan penghasil nanas madu adalah Kabupaten Pemalang. Dalam rangka peningkatan pendapatan wilayah, Kabupaten Pemalang juga memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan peluang investasi. Potensi tersebut antara lain potensi pertanian, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, sektor pengolahan, pertambangan, dan pariwisata.

Kuantitas investasi yang dihasilkan di Kabupaten Pemalang selama tiga tahun terakhir berfluktuasi antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing, baik yang mengalami penurunan maupun peningkatan (PMA). Berikut daftar investasi di Kabupaten Pemalang yang mengalami penurunan maupun yang tumbuh, menurut data yang diperoleh dari DPMTSP Kabupaten Pemalang:

Table 5.1. Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun 2018-2020

No.	Jenis Perusahaan	2018 (Juta Rp)	2019 (Juta Rp)	2020 (Juta Rp)
1.	PMDN	103.357,80	51.606,50	110.094,80
2.	PMA	1.152,10	2.237,20	1.039,20
Jumlah		104.509,90	53.843,70	111.134,00

Sumber : Bidang Bina Program dan Keuangan DPMPTSP Pemalang

Dalam upaya mewujudkan peningkatan investasi di Kabupaten Pemalang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang tentunya membutuhkan strategi dalam upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pemalang yaitu dengan menggunakan strategi promosi dan strategi teknologi informasi.

### 5.3. Strategi Promosi

Promosi memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyampaikan informasi mengenai peluang dan potensi investasi kepada pelaku usaha dan investor. Calon investor dan pelaku bisnis tidak akan dapat mempelajari potensi dan peluang investasi yang sekarang dapat diakses tanpa semacam strategi penerbitan atau pemasaran. Adapun pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang adalah melalui Pameran dan Media Cetak.

#### 5.3.1. Pameran

Ikut serta dalam kegiatan pameran sebagai bagian dari strategi promosi merupakan platform penting untuk menghadirkan potensi dan prospek investasi bagi para pelaku usaha atau investor untuk menaruh uangnya. Partisipasi dalam pameran adalah salah satu kegiatan ini. Pameran ini juga menghubungkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang dengan investor, termasuk investor lokal, regional, nasional, dan dunia, sehingga memungkinkan komunikasi langsung dengan mereka.



DPMPTSP Kabupaten Pemalang menyoroti sejumlah peluang daerah yang ada di Kabupaten Pemalang, antara lain perkebunan, peternakan, industri, pariwisata, dan kawasan prospektif lainnya. Peluang ini ditampilkan di peta. Dengan menarik investor, baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA), untuk melakukan investasi di Kabupaten Pemalang, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam skala yang lebih besar.

DPMPTSP Kabupaten Pemalang berupaya semaksimal mungkin dengan mengikuti pameran ini untuk mempromosikan berbagai potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pemalang, seperti wisata alam, komoditas unggulan, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, diharapkan potensi dan peluang investasi dapat lebih dipahami dan diapresiasi secara luas, yang pada akhirnya akan mendorong masuknya investor ke Kabupaten Pemalang.



Gambar 5.1. Kegiatan Pameran DPMPTSP Kab. Pemalang



Gambar 5.2. Kegiatan Pameran DPMPTSP Kab. Pemalang



### 5.3.2. Media Cetak

DPMPTSP menggunakan media cetak untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pemalang. Ini melibatkan pembuatan selebaran, buku, dan pamflet yang didistribusikan selama pameran serta pemasangan papan informasi seperti papan reklame atau papan reklame. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Pemalang menggunakan situs resminya dan sumber media lainnya untuk berbagi informasi tentang potensi, operasi investasi, dan pencapaiannya di bidang investasi.

DPMPTSP Kabupaten Pemalang secara berkala atau setiap tahun selalu mencetak buku berjudul Profil Investasi Kabupaten Pemalang yang didalamnya berisi tentang potensi daya dukung investasi seperti infrastruktur, geografis, sumberdaya manusia, dan lainnya. Dalam buku tersebut juga menjelaskan potensi sektor ekonomi dari berbagai sektor seperti perkebunan, peternakan, pertambangan, dan lain sebagainya. Buku tersebut diperbaharui setiap tahun karena isinya akan diperbaharui sesuai keadaan yang ada.

## 5.4. Strategi Teknologi Informasi

IPTEK saat ini telah berkembang cepat sehingga semua kegiatan tak luput dari adanya keterliban teknologi informasi salah satunya pada DPMPTSP yang mulai melibatkan teknologi informasi dalam upaya untuk meningkatkan investasi. Dengan adanya teknologi informasi para investor dapat dengan mudah mengakses pelayanan perijinan dan juga mengetahui

potensi investasi yang ada di Kabupaten Pemalang yang mudah diakses tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP. Teknologi informasi dilakukan yaitu pelayanan berbasis online melalui Online Single Submission (OSS) dan Gerai Investasi.

#### 5.4.1. Online Single Submission

Demi kemaslahatan warga Kabupaten Pemalang, DPMPTSP melakukan inovasi dengan memperkenalkan sistem pengurusan izin secara online atau disebut juga Online Single Submission untuk meningkatkan standar pelayanan publik yang terjangkau, cepat, dan lugas. DPMPTSP Kabupaten Pemalang telah memperkenalkan metode ini dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga Kabupaten Pemalang karena sangat penting untuk menentukan daya tarik suatu daerah sebagai tujuan investasi (OSS).

Sebelum OSS diperkenalkan, pelayanan perizinan dilakukan secara manual; Namun, proses ini sekarang didukung oleh teknologi informasi, dan sebagai akibatnya, kemampuan untuk menyelesaikan semua izin jauh lebih baik daripada kecepatan, akurasi, dan kapasitas. Inovatornya antara lain Penanaman Modal Kabupaten Pemalang dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menawarkan layanan perizinan dan investasi secara online. Hal ini sesuai dengan Pemberitahuan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Inisiatif kebijakan tersebut menghimbau pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk

bersinergi mendorong investasi di daerah dan mempercepat dunia usaha, dengan fokus pada pengusaha dalam dan luar negeri (masing-masing PMA dan PMDN).

Sebagai hasil dari peraturan ini, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) yang baru sedang diberlakukan. Dengan menggunakan sistem software open source ini, investor mengajukan izin usaha di DPMPTSP. Semua informasi perizinan usaha yang ditujukan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah tertuang dalam satu sistem yang dikenal dengan OSS (Online Single Submission). Tidak perlu mendaftar ulang saat menangani izin tambahan karena informasi tentang investor yang terdaftar selanjutnya dapat digunakan untuk menangani perizinan. Karena pendaftaran dapat diselesaikan secara online, bahkan investor tidak diharuskan hadir secara fisik di kantor administrasi untuk memberikan bukti. Adanya inovasi kebijakan ini saja sudah cukup untuk memicu minat dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kapasitas mereka untuk melakukan investasi yang sukses.

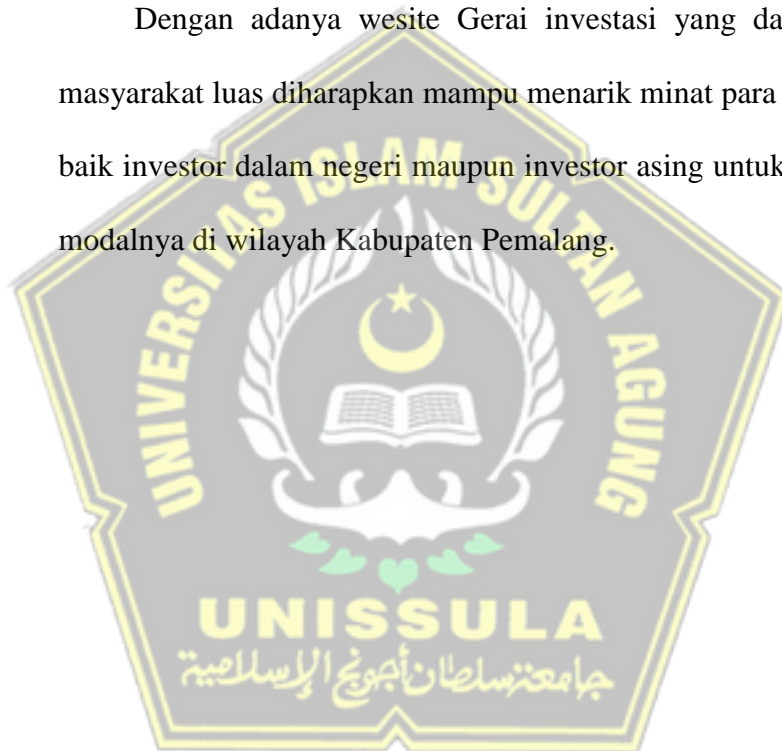
#### 5.4.2. Gerai Investasi

Menawarkan materi tentang potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pematang Jaya adalah bagaimana web promosi dilakukan. Setelah itu, materi ini dibagikan di media sosial sebagai upaya untuk menarik perhatian para pebisnis atau investor. Pelaksanaan promosi

diterbitkan secara bertahap sesuai dengan pemutakhiran data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

DPMPTSP Kabupaten Pemalang berinovasi membuat website Gerai Investasi yang berisi tentang potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Pemalang dari berbagai sektor unggulan seperti nanas madu, sarung goyor, pariwisata dan lainnya.

Dengan adanya website Gerai investasi yang dapat dijangkau masyarakat luas diharapkan mampu menarik minat para calon investor baik investor dalam negeri maupun investor asing untuk menamakan modalnya di wilayah Kabupaten Pemalang.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1. Kesimpulan**

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut sebagai hasil dari rincian penelitian yang telah disediakan:

- 1) Untuk mendorong lebih banyak investasi di Kabupaten Pemalang, DPMPTSP Kabupaten Pemalang aktif mempromosikan berbagai prospek investasi dari Kabupaten Pemalang. Hal ini diwujudkan dengan aktif mengikuti kegiatan pameran investasi yang diselenggarakan di berbagai lokasi dan mempromosikan potensi dan prospek investasi di Kabupaten Pemalang. Selain itu juga dicetak brosur dan brosur potensi investasi Kabupaten Pemalang.
- 2) Tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah untuk mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Hal itu dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi terkini yang berbasis online untuk mempermudah pengurusan perizinan dan investasi di Kabupaten Pemalang. Melalui menyediakan website Gerai Investasi dan juga menyediakan pelayanan perijinan melalui OSS yang berbasis online sehingga memudahkan investor dan calon investor untuk mengaksesnya.

#### **6.2. Rekomendasi**

- 1) Pemerintah Daerah harus terus bekerja dengan baik agar Kabupaten Pemalang dapat memanfaatkan secara maksimal semua potensi yang ada,

terutama yang masih belum terkelola, dan memanfaatkannya sebanyak mungkin sebagai peluang investasi. Hal ini diperlukan agar wilayah Kabupaten Pemalang dapat menyebar ke seluruh wilayah dan meluas serta berkembang lebih pesat. Calon investor tidak perlu ragu untuk berinvestasi di Kabupaten Pemalang karena kompetitif di tingkat lokal dan global.

- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang selalu berusaha memperkuat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta website yang dijalankan oleh dinas sebagai bagian dari kampanye untuk menarik lebih banyak investasi ke daerah. Situs web harus sederhana untuk dipahami dan mudah diakses.
- 3) Untuk kepentingan masyarakat, mereka harus bekerja untuk melestarikan dan melindungi kekayaan alam yang ada saat ini serta memperluas pengetahuan mereka di berbagai sektor. Mereka kemudian harus membangun pengetahuan ini untuk meningkatkan kemajuan mereka sendiri dan reputasi Kabupaten Pemalang.
- 4) Peneliti menyadari bahwa ada beberapa masalah dalam penelitian ini yang perlu ditangani, oleh karena itu ia menerima saran atau nasihat yang bermanfaat. Peneliti berharap temuan ini bermanfaat bagi akademisi masa depan yang terus mempelajari subjek ini secara lebih mendalam dan intensif. Peneliti juga berharap agar pembaca mendapatkan pandangan baru dari penelitian ini.



## **BAB VII**

### **REFLEKSI DIRI**

#### **7.1. Manfaat Dari Perkuliahan Untuk Magang**

Berbagai hal positif yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan sangat berperan dalam kelancaran selama kegiatan magang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan menjalani program magang di DPMPTSP Kabupaten Pemanang. Penulis mendapatkan banyak hal positif setelah selama 5 semester menjalani perkuliahan dan menerima teori-teori yang diberikan oleh bapak/ibu dosen di kelas akhirnya penulis bisa langsung melihat dan praktek di lapangan melalui program magang ini. Ilmu dan teori yang diberikan dosen seperti Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dan masih banyak lagi menjadi bekal dalam menjalani kegiatan magang.

Selain manfaat dari mata kuliah yang selama ini diperoleh oleh penulis, penulis juga merasakan banyak manfaat yang diperoleh selama kegiatan magang terlebih lagi melalui kegiatan magang ini penulis menjadi tau dan memiliki gambaran tentang dunia kerja khususnya bidang pengembangan investasi dan juga perijinan di DPMPTSP Kabupaten Pemanang.

#### **7.2. Manfaat dan Kekurangan Magang Untuk Pengembangan *Soft-Skills***

Kelebihan magang di DPMPTSP Kabupaten Pemanang antara lain pengembangan softskill penulis melalui penugasan yang diberikan kepada penulis selama magang guna meningkatkan kemampuannya dalam



berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta magang lainnya. Minimnya kegiatan magang dalam upaya meningkatkan softskill penulis adalah belum mampu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap pekerjaan yang diberikan karena masih perlu saling bertanya tentang setiap mata pelajaran. Penulis perlu meningkatkan etos kerja dan kemampuan mengatur waktunya agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan tepat waktu.

### **7.3. Manfaat dan Kekurangan Magang Terhadap Pengembangan**

#### **Kemampuan Kognitif**

Kemampuan meningkatkan kecermatan dan kemampuan penulis dalam melihat pekerjaan verifikasi data laporan perkembangan investor yang masuk (LKPM) dan mendaftarkan surat yang akan diterbitkan kepada perusahaan untuk kegiatan bimbingan teknis sosialisasi dari DPMPTSP kepada investor merupakan dua manfaat dari kegiatan magang di DPMPTSP Kabupaten Pematang Siantar untuk pengembangan keterampilan kognitif penulis. Karena pekerjaan yang diberikan tidak terlalu beragam, tidak ada kegiatan magang untuk membantu pengembangan kapasitas kognitif penulis untuk berpikir, yang menghasilkan kemampuan yang kurang berkembang.

### **7.4. Faktor-faktor Kunci Sukses**

Berdasarkan pengalaman mereka selama magang di DPMPTSP Kabupaten Pematang Siantar, penulis menemukan kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan tersebut meliputi syarat untuk menjalin hubungan yang solid

dan berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Kualitas pekerjaan dipengaruhi oleh budaya tempat kerja. Komponen penting lainnya adalah manajemen waktu dan beban kerja, karena akan meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan reputasi yang baik dan rasa tanggung jawab kepada personel, yang pada gilirannya akan menginspirasi kepercayaan kepada atasan dan sesama karyawan. Tanpa mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi tempat seseorang bekerja, sulit untuk berhasil di tempat kerja. Hal ini penting untuk menjaga reputasi orang dan organisasi.

#### **7.5. Rencana Pengembangan Diri**

Penulis bisa mendapatkan wawasan tentang berbagai aspek peningkatan diri, kemajuan karir, dan kemungkinan pendidikan lainnya selama hampir empat bulan magang di DPMPTSP Kabupaten Pematang. Sambil melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka selama magang, penulis bercita-cita untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri dengan terus memperluas pengetahuan mereka. Selain itu, penulis bermaksud meminta komentar atas semua pekerjaan yang telah diselesaikan sehingga ia dapat memastikan apakah ia telah melakukan kesalahan atau tidak. Selama karir mereka, penulis memperoleh kesadaran dasar tentang bagaimana memilih pekerjaan yang memberikan peluang entry-level. Keputusan untuk mencari pendidikan lebih lanjut oleh penulis saat ini untuk diperdebatkan. Hal ini sebagai akibat dari preferensi penulis

untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum melanjutkan pendidikan lebih lanjut.



## DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. U., & Bakar, A. (2018). Analisis daya saing sektor unggulan dalam struktur perekonomian kabupaten mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 2(1).
- Erislan, (2018) Manajemen Strategi Konsep dan Penerapan, (Bandung): Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Freddy Rangkuti, (2017) Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta): Gramedia Pustaka Utama.
- Herfita, D., Widyastuti, T., & Gustari, I. (2017). Analisis Strategi Bisnis Pada Pt Gancia Citra Rasa. *Jurnal Eksekutif*, 14(2), 369-383.
- Karsana, I. W. W. (2019). Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Ward & Peppard Pada Sekolah Bali Kiddy. *JURNAL ILMU KOMPUTER INDONESIA*, 4(1), 41-49.
- Pesurnay, R. T., & Parera, J. M. (2018). Analisis Tipologi Klassen Dan Penentu Sektor Unggulan Di Kota Ambon-Provinsi Maluku. *PELUANG*, 12(1).
- Pontoh, W., & Budiarmo, N. S. (2020). Keputusan Investasi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 27-32.
- Rasjid, F., Masinambow, V. A., & Niode, A. O. (2021). ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Regiyati, S., & Rusli, Z. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 47-56.
- Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Yunita, L. D., & Handayani, T. (2018). Strategi Bauran Promosi Penyelenggaraan Event (Studi Kasus Perencanaan dan Penyelenggaraan Event Pasar Murah). *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 4(1), 14-24.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[Dinasmptsp.pemalangkab.go.id](http://Dinasmptsp.pemalangkab.go.id)

[Dindikbud.pemalangkab.go.id](http://Dindikbud.pemalangkab.go.id)

[Diskominfo.pemalangkab.go.id](http://Diskominfo.pemalangkab.go.id)

[Disparpora.pemalangkab.go.id](http://Disparpora.pemalangkab.go.id)

[Jatengprof.go.id](http://Jatengprof.go.id)

